



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JENAL MUTAKIN
2. Jabatan : PANITERA MUDA PERKARA GUGATAN
3. NHK : 659289

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 325.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/21 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 2350 m2/2350 m2 di KAB / KOTA SUKABUMI, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 295 m2/295 m2 di KAB / KOTA CIBADAK, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA CIBADAK, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 58.000.000

1. MOBIL, MITSUBISHI T 120 SS Tahun 1995, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
2. MOTOR, YAMAHA JUPITE MX Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT H1B02N42LOA/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
4. MOTOR, HONDA SUPRA X 125 AFX12U21C08M/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 92.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 92.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 386.184.000



III. HUTANG

Rp. 40.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 346.184.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.